



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 28 Agustus 2017
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 23.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Ir. H. S.W. Yudha, M.Sc, ME (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Acara	: 1. Fungsi dan kinerja organisasi PT Pertamina (Persero) beserta anak perusahaannya. 2. Nama anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan bidang usahanya. 3. Evaluasi aspek operasional dan keuangan anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero). 4. Penataan Pendistribusian Migas yang berada di bawah PT. Pertamina (Persero). 5. Evaluasi kinerja seluruh Kilang dan Depot PT. Pertamina (Persero).

**KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 dibuka pukul 13.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. S.W. Yudha, M.Sc, ME, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Fungsi dan kinerja organisasi PT Pertamina (Persero) beserta anak perusahaannya.

- b. Nama anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan bidang usahanya.
- c. Evaluasi aspek operasional dan keuangan anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero).
- d. Penataan Pendistribusian Migas yang berada di bawah PT. Pertamina (Persero).
- e. Evaluasi kinerja seluruh Kilang dan Depot PT. Pertamina (Persero).

## II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), terkait struktur organisasi Pertamina, termasuk jumlah anak perusahaan dan pengelompokan anak perusahaan meliputi:
  - a. Hulu ( 8 Anak Perusahaan)
  - b. Gas (2 Anak Perusahaan)
  - c. Pemasaran (4 Anak Perusahaan)
  - d. Keuangan (2 Anak Perusahaan)
  - e. SDM (4 Anak Perusahaan)
2. Komisi VII DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk menghadirkan Direksi anak-anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) pada Rapat Dengar Pendapat yang akan di jadwalkan lebih lanjut.
3. Komisi VII DPR RI telah menerima penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tentang kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) serta kontribusi anak perusahaan untuk tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

(US\$ Milyar)

Keterangan	Revenue		EBITDA		Net Income	
	2016	Sm I 2017	2016	SM 1 2017	2016	Sm I 2017
Induk Prsh (konsolidasi)	36,49	20,50	7,56	3,16	3,15	1,40
Anak Prsh	10,90	6,08	4,49	2,52	1,86	0,91
Kontribusi AP	30%	29%	59%	79%	59%	65%

4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap distribusi LPG 3 Kg dan proses perizinan keagenan LPG bersubsidi 3 Kg, yang akan dilaporkan secara bertahap, dengan tahap pertama pada bulan Desember 2017 dan final pada bulan Maret 2018.
5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk memberikan data SPBU yang tidak menjual BBM jenis tertentu yang merupakan PSO dan memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat dan juga nelayan dalam memperoleh BBM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Komisi VII DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan perluasan pemasangan fasilitas *New Gantry System* ke seluruh depo BBM.
7. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk memasang teknologi pengukuran yang dipasang pada alat angkut BBM ke SPBU, untuk mengurangi kehilangan (*loss*) dan meminimalkan penyimpangan dalam distribusi BBM dengan SPBU-N di Demak sebagai pilot project untuk diimplementasikan di tempat lain.
8. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi praktek penyelenggaraan usaha oleh PT Patra Niaga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan, dan selama masa evaluasi PT Patra Niaga menanggung kompensasi atas masalah *lay off* tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dan memberikan laporan tertulis kepada Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 6 September 2017.
9. Komisi VII DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap depo-depo BBM milik PT Pertamina (Persero) dan memetakan standar keamanan depo sesuai dengan standar keamanan internasional, bagi depo berdasarkan hasil audit yang dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan nasional dan tidak layak perlu segera direlokasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero).
10. Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera membangun fasilitas penyimpanan LPG yang sudah dianggarkan baik melalui APBN maupun PT Pertamina (Persero).



11. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 20 September 2017.

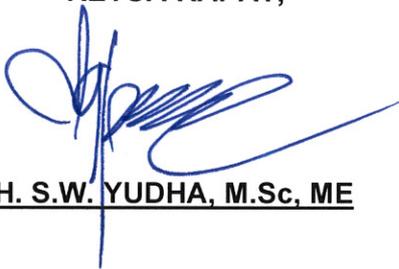
**III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 23.20 WIB

 **DIREKTUR UTAMA  
PT PERTAMINA (PERSERO)**

  
**Ir. ELIA MASSA MANIK, MBM**

Jakarta, 28 Agustus 2017  
**KETUA RAPAT,**

  
**Ir. H. S.W. YUDHA, M.Sc, ME**